



# **LAPORAN KINERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN  
JEMBER**

**TAHUN 2023**

**TAHUN 2024**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2023, yaitu "mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021- 2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (Dua) indikator sasaran, dengan capaian 20 (Dua puluh) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah

dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 97,73% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **sangat memuaskan**, upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.74.001.311.088,- terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.3.463.625.577,- Belanja Barang dan Jasa Rp.7.541.390.964,- Belanja hibah sebesar Rp.65.272.201.547,- dan Belanja Modal Rp.243.269.900,-,-

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 72.317.991.298,- (97,73%) dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain :

1. Tidak terserapnya anggaran hibah Polres Jember
2. Adanya Program Efisiensi anggaran yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Program kegiatan akan direncanakan lebih baik
2. Kegiatan akan lebih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.. berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.. diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Jember, 2 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**

Rembina Utama Muda

NIP. 19650309 198602 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	9
C. PERJANJIAN KINERJA .....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	14
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 .....	14
B. CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	35
BAB IV. PENUTUP. ....	41
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. Perejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 5. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 6. Lampiran SK IKU Perubahan PD</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2023 sebagai berikut : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
  - terdiri atas, kelompok Jabatan Fungsional

- d. Bidang Politik Dalam Negeri.  
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.  
terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.  
terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

**D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 21 ASN dan 12 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

**Tabel 1.1**  
Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
berdasarkan Jabatan  
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Badan	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kabid	4	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	
5.	Perencana Ahli Muda	1	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
7.	Analisis Wawasan Kebangsaan	1	
8.	Bendahara	1	
9.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	
10.	Pengadministrasi Umum	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	

**Tabel 1.2**  
 Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang  
 periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tingkat I	III/d	3
5	Penata	III/c	1
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7	Penata Muda	III/a	2
8	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	1
	<b>Jumlah</b>		<b>21</b>

**Tabel 1.3**  
 Jumlah ASN dan Non ASN Badan Kesatuan  
 Bangsa dan Politik  
 berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
 periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	9	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	6	ASN
6	S2	5	ASN
7	SD		Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	7	Non ASN
10	D3		Non ASN
11	S1	4	Non ASN
12	S2		Non ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

1. Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kerjasama Ormas
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten ke 10 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

## RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Membina berbagai Organisasi Masyarakat untuk menguatkan Ideologi pancasila dan wawasan Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat	Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021-2026**

- 1) Tujuan : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan stabilitas politik di daerah
- 2) Indikator Tujuan : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial (Konflik yang tertangani) Daerah yang	100	100	100	100	100	100

Sumber data : tabel TC. 25 pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026

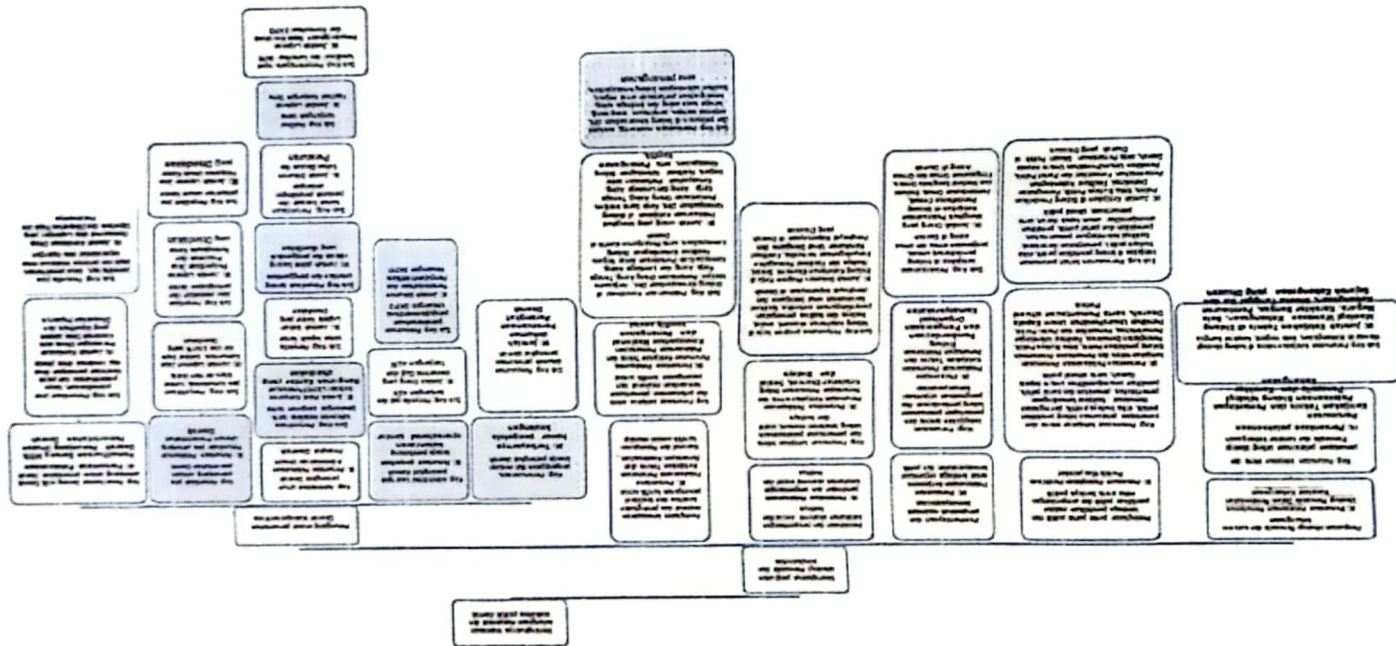
## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 065/13.01/35.09.415/2023 Tahun 2023;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100$	Data Pelaksanaan Program Bakesbangpol	Bakesbangpol
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi}}{\text{Jumlah konflik yang tertangani}} \times 100$	Tim Wawasan Dini Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis Badan, indikator kinerja utama, target

kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan anggaran 6 program tahun 2023 sebesar Rp 74.001.311.088,- (Tujuh puluh empat Milyar satu juta Tiga ratus Sebelas ribu Delapan puluh delapan rupiah)

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah

realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023 Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sasaran 1 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik di Daerah

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	97,73%	97,73%
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 2 (dua) indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata rata mencapai 97,73% dan masuk dalam kategori baik Dengan demikian maka secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	83,98%	98,88%	97,73%
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	97,73%	97,73%
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	97,73%		
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%		

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah

Ukuran keberhasilan sasaran ini diukur dengan perhitungan Persentase Indikator Program yang tercapai, yaitu dengan cara menghitung prosentase indikator program yang tercapai dibagi indikator program di Bakesbangpol tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota tercapai 86,48%
2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tercapai 93,77%
3. Program Peran Partai Politik dan Lem,baga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik tercapai 99,6%
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tercapai 0%
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tercapai 89,08%
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik social tercapai 52,81%

Sehingga rata-rata persentase indikator program tahun 2023 adalah 97,73% dan termasuk kategori capaian sangat memuaskan.

Realisasi persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 97,73% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian 97,73% sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 persentase indicator program yang tercapai menunjukkan (peningkatan/penurunan sesuai data) sebagaimana tersaji pada table 3.2. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi tahun 2023 menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal, karena telah tercapai di tahun ke-3 periode Renstra, sebagaimana tersaji pada table 3.3. Perbandingan dengan Realisasi Nasional tidak dapat disajikan karena tidak tersedia data Realisasi Nasional untuk indikator ini.

Sasaran Strategis 2 : Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Ukuran keberhasilan sasaran ini diukur dengan perhitungan Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)

Berdasarkan data pada Bidang Kewaspadaan Dini Nasional dan Penanganan Konflik, jumlah data konflik sosial daerah pada tahun 2023 sebanyak 20 antara lain :

1. Konflik Lembaga Pendidikan
2. Konflik Agraria
3. Konflik Ketenagakerjaan
4. Konflik SARA (Suku, Agama dan Ras)

100% dari konflik tersebut dapat tertangani dan termasuk dalam kategori capaian Sangat memuaskan.

Realisasi Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani) pada tahun 2023 sebesar 100%dari target 100%. Hal ini menunjukkan capaian 100%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani) menunjukkan (peningkatan/penurunan sesuai data) sebagaimana tersaji pada table 3.2. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi tahun 2023 menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal, karena telah tercapai di tahun ke-3 periode Renstra, sebagaimana tersaji pada table 3.3. Perbandingan dengan

Realisasi Nasional tidak dapat disajikan karena tidak tersedia data Realisasi Nasional untuk indikator ini.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah								
Indikator 1 Persentase Indikator Program yang tercapai	97,73%	√						
Rata rata capaian	97,73%	√						
Sasaran 2. Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman								
Indikator 2 Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	√						
Rata rata capaian	100%	√						

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kategori baik

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah

Capaian dengan kategori sangat memuaskan pada sasaran ini didukung beberapa factor penunjang yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan per bidang di Bakesbangpol
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan berjalan baik (Koordinasi dan Kolaborasi dengan Instansi Terkait)
3. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rutin

Beberapa kendala dalam capaian sasaran ini :

1. Tidak terserapnya anggaran hibah Polres Jember
2. Adanya Program Efisiensi anggaran yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan

Terkait kendala tersebut, kedepan akan dilaksanakan langkah-langkah perbaikan yaitu :

1. Program kegiatan akan direncanakan lebih baik
2. Kegiatan akan lebih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol

Sasaran Strategis 2 : Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Capaian dengan kategori sangat memuaskan pada sasaran ini didukung beberapa faktor penunjang yaitu :

1. Tim wasdin yang dibentuk terdiri dari unsur antara lain: Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Yon 509 Raider, Yon Armed 8, Imigrasi, Kemenag dan OPD terkait. Dimana Tim Wasdin berperan dalam :
  - a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) stabilitas nasional di daerah Kabupaten Jember.

- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah Kabupaten Jember.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
2. Maksimalnya peran Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin)
  3. Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan/Dsikusi tentang Penanganan Konflik Sosial tepat sasaran dan berjalan baik
  4. Kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan/konflik IPOLEKSOSBUD berjalan maksimal

Beberapa kendala dalam capaian sasaran ini :

1. Tingkat partisipasi masyarakat masih kurang
2. Tidak semua permasalahan diselesaikan di tingkat Kabupaten (Tidak terdeteksi sampai tingkat Kabupaten)

Terkait kendala tersebut, kedepan akan dilaksanakan langkah-langkah perbaikan yaitu :

1. Melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive terhadap Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan terjadinya konflik social.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dan membangun jaring komunikasi yang lebih luas

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 didukung 6 (enam) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	<b>Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
	Input : Jumlah Dana/Anggaran untuk Pembentukan Kader Bela Negara	1.401.169.500	1.391.869.500	99,34%
	Output : Jumlah peserta yang mengikuti Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara	1.184 orang	1.091 orang	92,14%
	Outcome : Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara terdiri dari 4 angkatan dengan peserta dari Kepala Desa dan Lurah, Satpol PP, ASN dan Banser NU dengan jumlah peserta 1.184 orang			





2	<b>Program : Politik Dalam Negeri</b>	65.535.486.647	65.273.535.947	99,60
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	65.535.486.647	65.273.535.947 5.947	99,60
	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik....	65.535.486.647	65.273.535.947	99,60
	Input : Jumlah Dana/Anggaran untuk bantuan Keuangan	64.772.201.547	64.772.201.547	100%
	Output : Jumlah Lembaga Penerima bantuan keuangan kepada Partai Politik, KPU dan Bawaslu	2 Lembaga dan 11 Parpol	2 Lembaga dan 11 Parpol	100%
	Outcome : Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan pada Partai Politik (11 Partai), KPU dan Bawaslu dan Sosialisasi Pemilu			





3	<b>Program :Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	8.000.000	0	0
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	8.000.000	0	0

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.000.000	0	0
	Input : Jumlah Dana/Anggaran Ormas	0	0	0
	Output : Terselenggaranya Pemutakhiran data Ormas			
	Outcome : Terlaksananya peningkatan pemberdayaan Ormas			





4	<b>Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	437.010.500	389.268.925	89,08
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	437.010.500	389.268.925	89,08
	<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	437.010.500	389.268.925	89,08





5	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	1.205.778.600	636.743.800	52,81
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	491.977.600	449.991.950	91,47
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	491.977.600	449.991.950	91,47

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Input : Memelihara stabilitas wilayah			
Output : Prosentase adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial secara terpadu	100%	100%	100%
Outcome : Terselenggaranya sosialisasi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini Masyarakat.			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	713.801.000	186.751.850	26,16
Input : Koordinasi antar OPD dan Instansi terkait			
Output : Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	12	100
Outcome : Terwujudnya koordinasi antar OPD/Instansi terkait tersedianya bahan laporan serta kajian strategis sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan/keputusan Bupati			



#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat Daerah	100 %	97,73	Efisien
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyama	100%	100%	Efisien

Sumberdaya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 21 orang ASN dengan rincian 7 orang pejabat struktural dan 3 orang fungsional dan 11 orang pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa didukung anggaran sebesar Rp. 1.714.894.500,- dan terserap sebesar Rp. 1.608.041.250,-

Sumber daya di atas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rata- rata capaian 97,73 %.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 74.001.311.088,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 73.758.041.188,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp 243.269.900

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai enam (6) program dan sebelas (11) kegiatan, duapuluh empat(24) Sub. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	<b>Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.714.894.500	1.608.041.250	93,77
2	<b>Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	65.535.486.647	65.273.535.947	99,60
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	65.535.486.647	65.273.535.947	99,60

	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65.535.486.647	65.273.535.947	99,60
3	<b>Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	8.0000.000	0	0
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.000.000	0	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.000.000	0	0
4	<b>Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	437.010.500	389.268.925	89,08
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	437.010.500	389.268.925	89,08
	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	437.010.500	389.268.925	89,08
5	<b>Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	1.205.778.600	636.743.800	52,81

	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.205.778.600	636.743.800	52,81
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	491.977.600	449.991.950	91,47
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	713.801.000	186.751.850	26,16
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	5.100.140.841	4.410.401.376	86,81
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.925.577	3.296.151.131	87,81
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.198.815.577	2.786.964.151	87,12
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	555.110.000	509.186.980	91,73

3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.590.600	352.725.004	71,32
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.566.200	8.724.178	82,57
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.806.200	141.828.450	97,27
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.768.200	19.066.860	71,23
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	2.905.000	69,17
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	18.040.000	10.192.400	56,50
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.210.000	17.008.116	58,78
4.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.269.900	242.298.525	99,60
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	35.500.000	35.399.600	99,72
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin	207.769.900	206.898.925	99,58
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.495.800	168.702.036	71,94
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.605.000	67.983.775	60,37
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.768.200	4.767.020	99,98
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.122.600	95.951.241	81,92

5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.858.964	350.524.680	93,76
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.771.200	72.295.740	91,78
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.729.200	136.055.470	89,08
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000	24.900.000	99,60
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.358.564	117.273.470	99,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>74.001.311.088</b>	<b>72.317.991.298</b>	<b>97,73</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 sebesar Rp. 72.317.991.298,- dari total anggaran Rp. 74.001.311.088,- atau 97,73%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami *penurunan* sebesar 1,16 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 8.005.288.457,- terealisasi sebesar Rp 7.916.25.075,- atau 98,89%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Sangat Baik**) karena dari 2 (dua) jumlah indikator sasaran sebanyak 1 jumlah indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, 1 jumlah 1 indikator dalam kategori baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 72.317.991.298,- (97,73%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (tidak ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan, dengan hambatan dan permasalahan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain: Sasaran – sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) sudah sesuai dan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

## RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

### MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Membina berbagai Organisasi Masyarakat untuk menguatkan Ideologi pancasila dan wawasan Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat	Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESATUAN  
KABUPATEN JEMBER



**Drs. SIGIT AKBARI, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 002



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
 TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Kondusif antara eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Publik daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)	Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani	Meningkatkan Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan					2.435.570.700
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanlapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kader Bela Negara.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wasbang, terselenggaranya kegiatan forum Pembauran Kebangsaan dan terselenggaranya pembentukan kader bela negara	100%	2.435.570.700



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**RPJMD**

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Kondusif antara eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Publik daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan


**RKT**

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)	Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani	Meningkatkan Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan					2.485.670.700
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kader Bela Negara.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wasbang, terselenggaranya kegiatan forum Pembauran Kebangsaan dan terselenggaranya pembentukan kader bela negara	100%	2.485.670.700

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat					4.880.254.900
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik		Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan dana pada partai politik serta sosialisasi Pemilu kepada masyarakat untuk menekan golput	100%	4.880.254.900
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik					47.577.800
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	terselenggaranya Forum Silaturahmi Ormas		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	Jumlah program kerja yang disusun Forum silaturahmi Ormas/LSM	100%	47.577.800

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya					703.422.400
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2. Fasilitasi program P4GN (Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	100%	703.422.400
					Program Peningkatam Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						1.049.423.700
					Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terseleenggaranya Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100%	773.843.900

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	100%	275.584.800
						JUMLAH					9.188.304.300

Jember, Februari 2023  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**  
  
**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 PemDina Utama Muda  
 NIP.19681214 198309 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen. S. Parman Nomor 89 ☎ 0331-337853 Jember

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU  
Jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 1 Februari 2023

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Pertama  
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
  
Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si  
NIP. 19681214 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.046.762.860	APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.485.670.700	APBD
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.880.204.900	APBD
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	47.577.600	APBD
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	703.422.400	APBD
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.049.428.700	APBD
JUMLAH		14.213.067.160	

Jember, 1 Februari 2023



**Ir. H. GNEKSISWANTO, ST, IPU**

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Dr. H. BUDI SUSILO, M.Si  
NIP. 19681214 198809 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. S. Parman No. 89 Jember

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SIGIT AKBARI, M. Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua

  
BUPATI JEMBER,  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Pertama

  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
  
Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
NIP. 19650309 198602 1 002

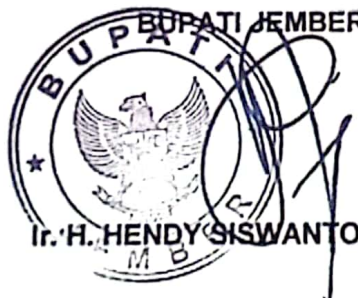
## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.100.140.841	P – APBD
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.714.894.500	P – APBD
3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etnika Serta Budaya Politik	Rp. 65.535.486.647	P – APBD
4. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 8.000.000	P – APBD
5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 437.010.500	P – APBD
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.205.778.600	P – APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 74.001.311.088</b>	<b>P – APBD</b>

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Pihak Pertama

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
  
Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
NIP. 19650309 198602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S. Parman No. 89 Telp. 0331-337853 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 13.01 /35.09.415/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  10. Peraturan Daerah nomor. 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 3 Januari 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**

Pemuda Utama Muda

NIP. 19691214 198809 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
- Tujuan** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Prosentase pelayanan Bakesbangpol yang terlaksana	Bakesbangpol Kab. Jember	Bakesbangpol Kab. Jember

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 Pemimpin Utama Muda  
 NIP. 19691214 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S. Parman No. 89 Telp. 0331-337853 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 02 /35.09.415/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah nomor. 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 4 September 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650309 1986021 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatakan kualitas pelayanan publik
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Program Bakesbangpol	Bakesbangpol
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi}}{\text{Jumlah konflik yang tertangani}} \times 100\%$	Tim Wawasan Dini Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. SIGIT AKBARI, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 002